

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH SINGKAT BPPKB KOTA PASURUAN

Dasar pemikiran lahirnya program-program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia tidak lain adalah karena adanya permasalahan kependudukan yang memang perlu untuk segera diselesaikan. Aspek-aspek penting dalam kependudukan yang harus segera dibenahi tersebut di antaranya adalah : (1) besarnya jumlah penduduk yang berpotensi menyebabkan ledakan penduduk, (2) tingginya angka pertumbuhan penduduk karena jumlah kelahiran yang tidak terkendali, dan (3) jumlah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga menyebabkan kepadatan di daerah-daerah tertentu.

Sebelum abad XX, di negara-negara barat sudah ada usaha pencegahan peledakan penduduk karena berbagai alasan kesejahteraan penduduk. Caranya memang extreme, yaitu dengan cara membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah atau mengatur kehamilan. Di Inggris, upaya yg ditempuh untuk perbaikan kesejahteraan penduduk (terutama di kalangan keluarga buruh) adalah dengan cara mengatur kelahiran anak. Hal ini dilakukan menggunakan cara-cara sederhana, seperti : kondom, pantang berkala, dll. Sedangkan di Amerika Serikat, Margareth Sanger memperoleh pengalaman dari Sadies Sachs yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Kemudian pengalamannya tersebut dituliskan menjadi

sebuah buku yang berjudul “*Family Limitation*” (Pembatasan Anggota Keluarga).

Sedangkan di Indonesia sendiri, pelaksanaan program KB dimulai pada awal abad XX (www.bkkbn.go.id). Sebelum tahun 1957, pembatasan kelahiran dilakukan secara tradisional. Seperti contohnya dengan cara : penggunaan ramuan, pijet, absistensi atau wisuh atau bilas liang senggama setelah coitus, dan lain-lain. Sedangkan setelah tahun 1957, perkembangan *birth control* di daerah-daerah mulai terlihat mengalami kemajuan dan modernisasi. Seperti beberapa contohnya adalah : (1) berdirinya klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta pada 12 November 1962, (2) di Semarang berdiri klinik BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) dan terbentuk PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) tahun 1963, (3) di Jakarta, Prof. Sarwono P. memulai pelaksanaan praktek *birth control* di poliklinik bagian kebidanan RSUP.

Pada tahun 1967, Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjut, Menteri Kesejahteraan Rakyat (Menkesra) membentuk Panitia *Ad-Hoc* yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan program nasional. Selanjutnya, pada tanggal 07 September 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1968 kepada Menkesra, yang isinya antara lain:

- 1) Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana
- 2) Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan SK No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan bagi pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan antara Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 melalui SK No. 36/KPTS/Kesra/X/1968 dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Dengan terbentuknya LKBN yang mempunyai tugas pokok untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, maka bermunculanlah program-program pengendalian penduduk atau lebih akrab disebut dengan program KB.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan LKBN di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 09 Tahun 2004 (yang sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota selambat-lambatnya Desember 2003. Dengan demikian, maka tahun 2004

merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (UU No. 52 Tahun 2009 pasal 54 ayat 1 dan 2).

Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan pionir dalam melaksanakan program KB. Berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970, Provinsi Jawa Timur bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Bali ditetapkan sebagai provinsi perintis dalam pelaksanaan program KB. Keenam provinsi tersebut ditunjuk sebagai pionir karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dengan terbentuknya BKKBD di tingkat Provinsi Jawa Timur, maka otomatis diikuti dengan dibentuknya BKKBD tingkat kabupaten dan kota. Untuk Kota Pasuruan sendiri, lembaga ini mengalami beberapa kali pergantian nama. Seperti pada tahun 2007, BKKBD berganti nama menjadi BKBKS (Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) Kota Pasuruan. Dan pada tahun 2009, berubah nama lagi menjadi BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Di sini dapat diketahui bahwa BKBKS Kota Pasuruan mengalami penggabungan dengan Badan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Pasuruan

(yang sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan memang berwenang untuk mengatur sendiri lembaga-lembaga yang berada di lingkup Kota Pasuruan) menganggap bahwa dikarenakan target sasaran kedua lembaga ini sama-sama mengurus perempuan, maka digabungkanlah kedua lembaga ini untuk efisiensi pelaksanaan program-programnya.

B. LOKASI BPPKB KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Panglima Sudirman Nomor 119A, Kota Pasuruan, Jawa Timur

Website : <http://bppkb.pasuruankota.go.id/>

Phone : (0343) 424614

Email : dp3akbkotapasuruan@gmail.com

C. VISI DAN MISI BPPKB KOTA PASURUAN

Kerangka Rencana Strategis BPPKB Kota Pasuruan yang direncanakan pada periode 2011-2015 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2025. Dengan demikian, pernyataan Visi dan Misi yang termuat dalam Perencanaan Strategis BPPKB merupakan pengejawantahan operasional dari Visi dan Misi Renstra Kota Pasuruan tersebut. Pernyataan Visi dan Misi BPPKB diarahkan pada upaya untuk pencapaian Visi dan Perwujudan Misi Pemerintah Kota Pasuruan.

1. VISI

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Pasuruan adalah : “Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang Berkesetaraan Gender Bagi Masyarakat Kota Pasuruan”.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi BPPKB yang dimaksud di atas, diperlukan Misi yang merupakan penjabaran dan sekaligus sebagai nilai pendorong dalam pencapaian visi tersebut. Lebih jauh, misi BPPKB memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka misi BPPKB Kota Pasuruan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan SDM pelaksana pelayanan KB yang professional
- 2) Mengoptimalkan pelayanan KB yang terjangkau, bermutu, dan merata
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut merencanakan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
- 4) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas
- 5) Meningkatkan fasilitasi bantuan kepada keluarga miskin dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin
- 6) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak

- 7) Meningkatkan fasilitasi untuk keadilan, kesetaraan dan pengarusutamaan gender (PUG)
- 8) Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

D. LOGO BPPKB KOTA PASURUAN

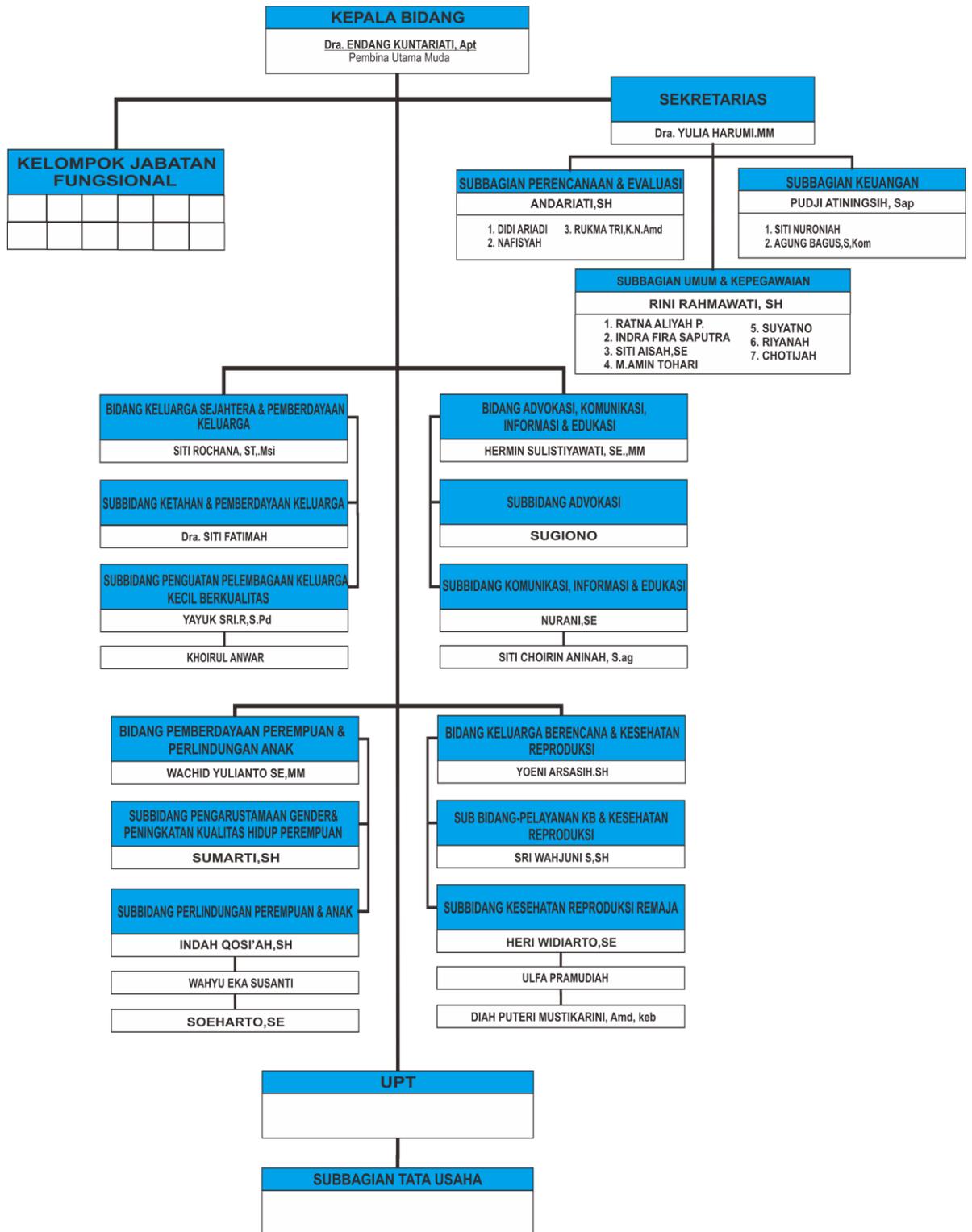


Gambar 1 : Logo BPPKB Kota Pasuruan
Sumber : Dokumentasi BPPKB Kota Pasuruan

Penggunaan logo setiap Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia adalah sama, yaitu seperti logo sebelah kanan yang menggambarkan KKBN (Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yaitu keluarga yang beranggotakan bapak, ibu, dan 2 anak.

Untuk penggunaan logo di masing-masing kabupaten atau kota di sebelah kiri logo KKBN adalah sebagai tanda lokasi dimana BPPKB itu berada. Di sini tertera di sebelah kiri logo KKBN ada logo Kota Pasuruan yang berarti menunjukkan logo BPPKB Kota Pasuruan.

E. STRUKTUR ORGANISASI BPPKB KOTA PASURUAN TAHUN 2015



Gambar 2 : Struktur Organisasi BPPKB Kota Pasuruan
Sumber : Dokumentasi BPPKB Kota Pasuruan

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) BPPKB KOTA PASURUAN TAHUN 2015

1. TUGAS POKOK :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan perlindungan anak.

2. FUNGSI :

- 1) Penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana keluarga sejahtera pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 4) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.